No
Date

Nama : Andi Purnomo
kelas : 10 H
PSTS = PKN

1. B	6. B	11. B	16. B
2. A.	7. C.	12. A	17. C.
3. C	8. C	13 A.	18. B.
4. E.	9. B	14 B.	19. A.
5. C	10 E.	15. A	20. B.

1. Peran utama Dr. Radjiman Widigodiningrat selaku ketua BPUPKI :
   - Meminpin & mengendalikan jalannya sidang
   - Menengahi & menyatukan pikiran
   - Membuka persidangan
2. Mr. Muhammad Yamin.
   - Peri kebangsaan
   - Peri kemanusiaan
   - Peri ketuhanan
   - Peri kerakyatan
   - kesejahteraan rakyat

   Mr. Soepomo :
   - Negara adalah kesatuan utuh - bukan kumpulan individu, melainkan satu tubuh rakyat yg tak terpisahkan.
   - Tidak memisahkan kepentingan individu & negara.
   - Persatuan yg kuat

   Ir. Soekarno.
   - Nasionalisme.
   - Internasionalisme
   - Mufakat / demokrasi
   - kesejahteraan sosial
   - ketuhanan yg berkebudayaan.

KENKO® 30 Lines, 6 mm

No
Date

3. - Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
- Menjamin keselarasan antar umat beragama
- Mewujudkan prinsip toleransi & kebebasan beragama.

4. Pancasila adalah pedoman hidup, arah, & tujuan bangsa Indonesia. Pancasila tdk diam tetapi hidup & menuntun bangsa menuju kemajuan yg berakar pd nilai2 bangsa.

5. Bentuk pengamalan pancasila di sekolah.
Sila ke 1 =
- Berdoa sebelum memulai pelajaran.
Sila ke 3 =
- Ikut serta dlm kerja bakti membersihkan sekolah.
Sila ke 5 =
- Bersikap adil kpd teman, menghargai & tdk menghina teman

6. Kesadaran hukum adalah pemahaman, kesadaran, & sikap seseorang maupun masyarakat terhadap hukum yg berlaku - bukan sekedar mengetahui aturan, tetapi juga secara sukarela mematuhinya karna menyadari bahwa hukum itu bermanfaat bukan hanya karna takut dihukum.

7. Bentuk pelanggaran hak ; contohnya :
- Membuat kebisingan berlebihan
- Mengamcoh atau merundung tetangga.
Bentuk pelanggaran kewajiban, contohnya :
- Melanggar lalu lintas
- Melanggar & membuang sampah sembarangan.

8. Peraturan perundang2an harus disusun secara hirarkis / bertingkat adalah agar sistem hukum teratur & konsisten, menjamin kepastian hukum, mencegah pertentangan antar aturan

No
Date

Konsekuensi jika ada aturan yang lebih rendah bertentangan dg aturan diatas
- Peraturan yang lebih rendah tersebut batal atau tidak sah keberlakuanya

- Peraturan yang bertentangan dapat dibatalkan melalui uji hukum (seperti ujian materi ke Makamah Agung
- Aturan yang bertentangan harus disesuaikan atau di cabut agar sebaras dg aturan lebih tinggi

9 - Sumber hukum materiil
Tempat di ambilnya isi atau Materi dri hukum
- Isinya bukan dari aturan itu sendiri, tapi dari keadaan masyarakat

- Sumber hukum formal
bentuk resmi yang memiliki kekuatan meningkat dan sah menurut undang-undang

10 - Mencegah pertentangan dan tumpang tindih antar aturan
— proses ini memastikan bahwa peraturan yang satu tidak bertentangan atau tumpang tindih dan peraturan lainya